

## **PENGARUH PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB) TERHADAP PAD ACEH**

### **Abstract**

*This study aims to determine the effect of motor vehicle tax and the tariff of transfer motor vehicle name to the locally-generated revenue, the contribution of the locally-generated revenue to the total revenue of districts in Aceh province. The data used in this research is time series during the period 2007-2013. The data analysis method used in this research is multiple linear regression with ordinary least square (OLS). The results showed that motor vehicle tax and the tariff of transfer motor vehicle name significantly had a positive effect on the locally-generated revenue of districts in Aceh province. The contribution of the locally-generated revenue to total regional revenue is relatively low, the contribution of motor vehicle tax to the locally-generated revenue is higher than the contribution of the tariff of transfer motor vehicle name to the locally-generated revenue, therefore the Aceh government should be able to improve its own regional revenue by digging up new sources of the revenue besides of motor vehicle tax and the tariff of transfer motor vehicle name. In addition and a must that is the increase of locally-generated revenue also needs to be done by improving coordination among fellow related agencies in increasing motor vehicle tax the tariff of transfer motor vehicle name.*

**Nurul Aliah**

*Magister Ilmu Ekonomi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Syiah Kuala  
Email:nurulaliah90@gmail.com*

**Abubakar Hamzah**

*Staf Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Syiah Kuala*

**Muhammad Nasir**

*Staf Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Syiah Kuala  
E-mail: nasirmsi@yahoo.com*

### **Keywords:**

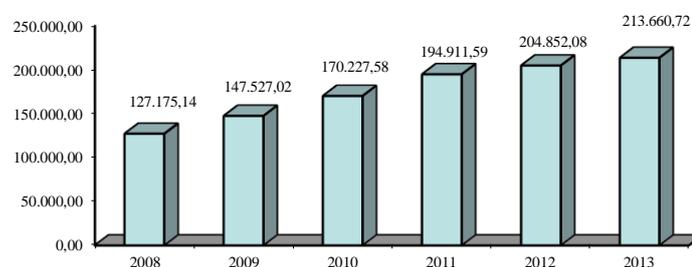
*Total Regional Revenue, Locally Generated  
Revenue, Motor Vehicle Tax, The Tariff of  
Transfer Motor Vehicle Name.*

## **PENDAHULUAN**

Peningkatan PAD sangat menentukan dalam penyelenggaraan otonomi daerah karena semakin tinggi PAD di suatu daerah maka daerah tersebut akan menjadi mandiri dan mengurangi ketergantungan kepada pusat sehingga daerah tersebut mempunyai kemampuan untuk berotonomi. Salah satu sumber PAD adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).

Penerimaan daerah yang bersumber dari PKB dan BBN-KB tidak hanya diperuntukan untuk kabupaten/ kota, tetapi terdapat bagi hasil antara kabupaten/kota dengan provinsi. Sebagaimana dinyatakan dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Bagi Hasil Pajak Aceh Kepada Kabupaten/Kota, Bagi Hasil Pajak Aceh kepada Kabupaten/Kota dapat ditetapkan sebagai berikut (1) Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen) dengan rincian 50 % (lima puluh persen) dibagi dengan porsi yang sama besar untuk keseluruhan kabupaten/kota; dan 50% (lima puluh persen) dibagi dengan pertimbangan jumlah penduduk, luas wilayah dan potensi pajak.

Gambar.1 menunjukkan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) di Provinsi Aceh berfluktuasi dari waktu ke waktu. Pada tahun 2008 penerimaan PKB sebesar Rp. 127.175,20 juta. Kemudian meningkat menjadi Rp 147.527,02 juta pada periode tahun 2009. Peningkatan tersebut disebabkan terjadinya peningkatan jumlah objek pajak yang dalam hal ini adalah kendaraan bermotor yang ada di Provinsi Aceh.



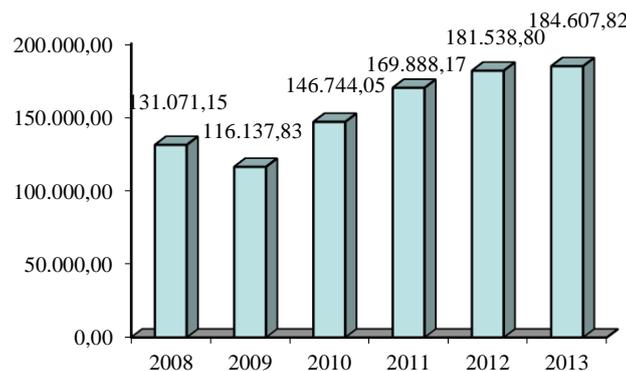
*Sumber: Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh (DPKA), 2014*

**Gambar. 1 Perkembangan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi Aceh Selama Periode Tahun 2008-2013 (Rp Juta)**

Peningkatan tersebut disebabkan terjadinya peningkatan jumlah objek pajak yang dalam hal ini adalah kendaraan bermotor yang ada di Provinsi Aceh. Pada tahun 2010 penerimaan daerah yang

bersumber dari pajak kendaraan bermotor meningkat lagi hingga menjadi sebesar Rp 170.227,58 juta, kemudian meningkat lagi hingga menjadi sebesar Rp 194.911,59 juta pada periode tahun 2011. Pada tahun berikutnya angka tersebut meningkat lagi menjadi sebesar Rp 204.852,08 juta pada tahun 2012 dan sebesar Rp 213.660,72 juta tahun 2013. Seiring dengan peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB), penerimaan daerah yang bersumber dari bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) juga mengalami peningkatan.

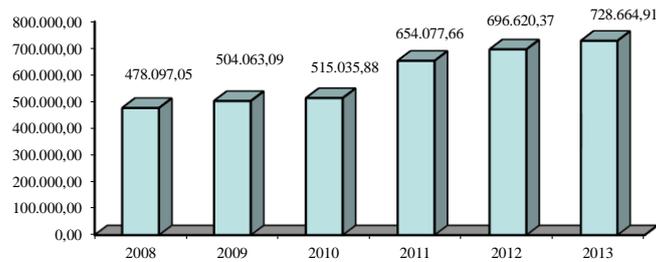
Gambar. 2 menunjukkan bahwa penerimaan daerah yang bersumber dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) berfluktuasi dari waktu ke waktu. Pada tahun 2008 penerimaan dimaksud sebesar Rp 131.071,15 juta. Kemudian menurun menjadi Rp 116.137,83 juta pada periode tahun 2009. Penurunan tersebut tentunya terkait dengan berkurangnya kuantitas jumlah pemilik kendaraan bermotor yang melakukan balik nama kendaraan bermotor yang mereka miliki. Selanjutnya pada tahun 2010 penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) meningkat menjadi sebesar Rp 146.744,05 juta, dan hingga tahun 2011 meningkat lagi hingga menjadi sebesar Rp 169.888,17 juta. Pada tahun berikutnya angka tersebut meningkat menjadi sebesar Rp 181.538,80 juta tahun 2012 dan sebesar Rp 184.607,82 juta tahun 2013.



*Sumber: Dinas Keuangan Daerah Aceh.*

**Gambar 2. Perkembangan Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) di Provinsi Aceh Selama Periode Tahun 2008-2013 (Rp Juta)**

Perkembangan penerimaan PAD Kabupaten Kota di Provinsi Aceh selama periode tahun 2008-2013 seperti terlihat dalam Gambar. 3

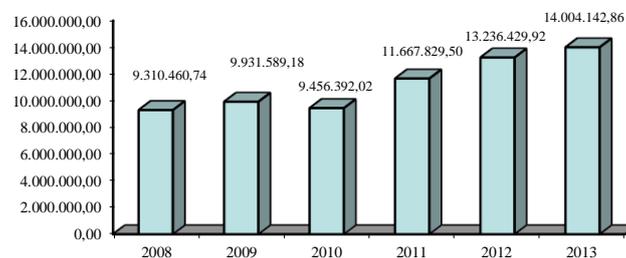


*Sumber: Dinas Keuangan Daerah Aceh.*

**Gambar. 3 Perkembangan Penerimaan PAD Kabupaten /Kota di Provinsi Aceh  
Selama Periode Tahun 2008-2013 (Rp Juta)**

Gambar. 3 memperlihatkan bahwa Total PAD kabupaten kota di Provinsi Aceh cenderung mengalami peningkatan tahun ke tahun. Pada tahun 2008 penerimaan dimaksud sebesar Rp 478.097,05 juta. Kemudian meningkat menjadi Rp 504.063,09 juta pada periode tahun 2009. Selanjutnya pada tahun 2010 penerimaan PAD meningkat menjadi sebesar Rp 515.035,88 juta, dan hingga tahun 2011 meningkat lagi hingga menjadi sebesar Rp 654.077,66 juta.

Pada periode berikutnya total PAD kabupaten kota di Provinsi Aceh meningkat menjadi sebesar Rp 696.620,37 tahun 2012 dan sebesar Rp 728.664,91 tahun 2013. Peningkatan PAD dapat berdampak pada peningkatan total penerimaan daerah (TPD). Hal ini disebabkan PAD merupakan salah satu komponen pembentuk pendapatan daerah. Gambar 4 memperlihatkan perkembangan total pendapatan daerah (TPD) Kabupaten Kota di Provinsi Aceh selama periode tahun 2008-2013.



*Sumber: Dinas Keuangan Daerah Aceh.*

**Gambar. 4 Perkembangan Total Pendapatan Daerah (TPD) Kabupaten Kota  
di Provinsi Aceh Selama Periode Tahun 2008-2013 (Rp Juta)**

Gambar. 4 di atas memperlihatkan bahwa TPD kabupaten kota di Provinsi Aceh berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2008 penerimaan dimaksud sebesar Rp 9.310.460,74 juta. Kemudian

meningkat menjadi Rp 9.931.589,18 juta pada periode tahun 2009. Selanjutnya pada tahun 2010 angka tersebut menurun menjadi sebesar Rp 9.456.392,02 juta. Kemudian pada tahun 2011 meningkat lagi hingga menjadi sebesar Rp 11.667.829,50 juta. Pada tahun-tahun berikutnya angka tersebut meningkat menjadi sebesar Rp 13.236.429,92 juta tahun 2012 dan sebesar Rp 14.004.142,86 juta tahun 2013.

## **TINJAUAN TEORITIS**

Mangkoesoebroto (1999:181) menyebutkan tentang teori penerimaan dan pengeluaran pemerintah dijadikan dasar sebagai teori keuangan daerah, yang menyebutkan bahwa penerimaan pemerintah yang berasal dari berbagai sumber penerimaan, yaitu penerimaan pemerintah yang bersumber dari pajak dan penerimaan bukan pajak, misalnya adalah penerimaan pemerintah yang berasal dari pinjaman pemerintah baik pinjaman Dalam Negeri maupun Luar Negeri, penerimaan dari Badan Usaha Milik Pemerintah, penerimaan dari lelang dan sebagainya. Selanjutnya keuangan daerah harus dilaksanakan dengan pembukuan yang terang, rapi dan pengurusan keuangan daerah harus dilaksanakan secara sehat termasuk sistem administrasinya. Dengan demikian diharapkan daerah menyusun dan menetapkan APBD nya sendiri (Azhari, 1995:39-40).

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber penerimaan daerah yang bersumber dari dalam daerah dapat dilihat dari besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Basri (2003:94) menyatakan, “parameter keberhasilan perkembangan daerah terefleksikan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membiayai pembangunan daerah. Potensi dana pembangunan yang paling besar dan lestari adalah bersumber dari masyarakat sendiri yang dihimpun dari pajak dan retribusi daerah”.

### **Pajak Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 “Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menjelaskan perbedaan antara jenis pajak daerah yang dipungut oleh Propinsi dan jenis pajak yang dipungut oleh Kabupaten/Kota. Pajak Propinsi ditetapkan sebanyak 5 (lima) jenis pajak, yaitu : (i) Pajak Kendaraan Bermotor; (ii) b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; (iii) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; (iv) Pajak Air Permukaan; dan (v) Pajak Rokok. Berkaitan dengan besarnya

tarif, berlaku definitif untuk Pajak Propinsi yang ditetapkan secara seragam di seluruh Indonesia dan diatur dalam PP No.65 Tahun 2001.

### **Pendapatan Asli Daerah**

Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut UU No. 33 Tahun 2004 adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ikhsan, Santosa dan Harmanti (2007:212) menyatakan, pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota terdiri dari:

1. Pajak Daerah.
2. Retribusi Daerah.
3. Bagian Laba BUMD dan Investasi lainnya.
4. Pendapatan Asli Daerah Lainnya.

### **Ketentuan Pemungutan Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah**

Pasal 1 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2002 Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah dinyatakan sebagai berikut.

- a. Biaya pemungutan Pajak Daerah yang dialokasikan kepada Tim Pembina Pusat, merupakan bagian dari biaya pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan-Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Penerangan Jalan.
- b. Alokasi biaya pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disebut Dana Penunjang Pembinaan (DPP).
- c. Dana Penunjang Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diberikan oleh Pemerintah Propinsi, Kabupaten, dan Kota, dalam bentuk Lumpsum yang sudah dipertanggungjawabkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan disetor ke rekening khusus Tim Pembina Pusat.

### **Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah**

Pajak daerah merupakan jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerahnya. Menurut Undang-undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sumber penerimaan daerah yang dapat menjamin keberlangsungan pembangunan di daerah dapat diwujudkan dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).

### **Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)**

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor, yaitu semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Pemungutan PBBKB diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 2000 yang telah direvisi menjadi UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2000, besarnya PBBKB yang dikenakan pada setiap liter bahan bakar yang dikonsumsi oleh masyarakat adalah sebesar 5 persen dari nilai jual sebelum pajaknya. Ini berarti dari setiap liter BBM yang dibeli oleh masyarakat, pemerintah daerah mendapatkan 5 persen penerimaan PBBKB. Sementara itu, besaran tarif PBBKB berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 paling tinggi sebesar 10 persen. Pengaturan lebih lanjut dilakukan terhadap kendaraan umum dengan tarif paling sedikit 50 persen lebih rendah dari tarif PBBKB untuk kendaraan pribadi.

### **Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Kontribusi masing-masing jenis pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan rasio antara jenis pajak tertentu dengan total Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada satu tahun tertentu, dan rasio antara jumlah total pajak daerah terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun tertentu.

Halim (2004: 162) menyatakan, untuk mengetahui kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dicari dengan rumus sebagai berikut.

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD} = \frac{\text{Total Pajak Daerah}}{\text{Total PAD}} \times 100\%$$

Selanjutnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD) dicari dengan rumus sebagai berikut.

$$\text{Kontribusi PAD terhadap TPD} = \frac{\text{PAD}}{\text{TPD}} \times 100\%$$



## **METODOLOGI PENELITIAN**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data *time series* selama periode 2007-2013. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu memaparkan temuan penelitian secara deskriptif kuantitatif. Selanjutnya untuk mengetahui pengaruh PKB dan BBN-KB terhadap PAD digunakan peralatan statistik regresi linier berganda.

$$PAD = f(PKB, BBN-KB)$$

Dimana :

PAD : Pendapatan Asli Daerah

PKB : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

BBN-KB: Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota digunakan formula analisis regresi linear berganda (*Multiple Regression*) diformulasikan sebagai berikut (Gujarati, 2006:134).

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Y : PAD

$\alpha$  : Konstanta

$X_1$  : PKB

$X_2$  : BBN-KB

$\beta_1$  dan  $\beta_2$  : Koefisien regresi  $X_1$  dan  $X_2$

$e$  : *Error term*

Penggunaan regresi linier berganda sebagai peralatan analisis data seperti dijelaskan di atas, mensyaratkan adanya uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang digunakan terdiri dari uji normalitas, multikolinieritas, autokorelasi dan heteroskedastisitas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Analisis Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh**

Estimasi fungsi regresi terhadap PAD kabupaten/ kota sebagai fungsi dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) disajikan dalam Tabel 2 (Secara lebih rinci, estimasi fungsi regresi tersebut dapat dilihat *output* Sazham).

Berdasarkan Tabel.2 diketahui bahwa hasil analisis regresi pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan bentuk linier berganda dengan pendekatan kuadrat terkecil (*ordinary least square*), diperoleh hasil persamaan sebagai berikut.

$$PAD = 2.624,7 + 0,9473PKB + 0,7651BBN-KB$$

Dimana:

PAD = Pendapatan Asli Daerah

PKB = Pajak Kendaraan Bermotor

BBN-KB = Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

**Tabel 2 Hasil Analisis Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Variabel	Konstanta/ Nama Variabel	Koefi- sien	Standar Error	t statistik		p-value
				t <sub>hitung</sub>	t <sub>tabel</sub>	
A	Konstanta	2.624,7	1330.	1,973	1,984	0,050
PKB	Pajak Kendaraan Bermotor	0,9473	0,1062	8,921	1,984	0,000
BBN-KB	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,7651	0,0961	7,968	1,984	0,000
Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) = 0,7283 Adjusted ( $R^2$ ) = 0,7248 F <sub>hitung</sub> = 211,741 F <sub>tabel</sub> = 3,087 P-value = 0,000 DW = 0,000		Predictor : PKB BBN-KB Dependent Variable : PAD				

*Sumber: Data Sekunder (Diolah), 2015.*

Berdasarkan hasil estimasi model regresi pada Tabel. 2 diketahui bahwa koefisien regresi masing-masing variabel independen sebesar 0,9473 untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan sebesar 0,7651 untuk Bea

Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten kota di Provinsi Aceh.

### **Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD)**

**Tabel 3 Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD)  
Kabupaten Kota di Provinsi Aceh Selama Periode Tahun 2007-2013**

No	Kabupaten /Kota	Tahun						
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Banda Aceh	6.69%	10.43%	9.87%	10.27%	9.56%	10.96%	10.83%
2	Sabang	3.04%	3.31%	4.66%	4.70%	4.59%	4.75%	4.69%
3	A. Besar	3.36%	3.66%	5.01%	6.31%	7.10%	5.59%	5.53%
4	Pidie	1.73%	2.89%	2.73%	4.85%	4.64%	3.51%	3.47%
5	Aceh Jaya	2.77%	4.85%	6.49%	5.12%	3.84%	4.00%	3.96%
6	Bireuen	2.86%	3.60%	6.30%	6.10%	8.26%	8.61%	8.51%
7	Pidie Jaya	13.63%	1.13%	1.44%	2.10%	3.25%	3.05%	3.01%
8	Bener Meriah	1.43%	5.50%	2.78%	4.19%	4.77%	4.22%	4.17%
9	Lhokseumawe	5.90%	6.49%	5.97%	6.99%	6.75%	5.92%	5.85%
10	Aceh Utara	9.95%	13.09%	11.15%	5.70%	5.53%	5.67%	5.61%
11	Aceh Timur	1.62%	5.50%	3.30%	7.12%	8.21%	4.66%	4.61%
12	Aceh Tengah	3.11%	3.72%	3.59%	4.80%	4.19%	3.81%	3.77%
13	Gayo Lues	1.65%	1.93%	2.27%	3.03%	3.08%	2.64%	2.61%
14	A. Tenggara	2.36%	1.91%	2.39%	2.09%	4.41%	3.03%	2.99%
15	Langsa	5.00%	6.88%	7.00%	6.90%	6.00%	5.55%	5.49%
16	A. Tamiang	5.15%	4.46%	5.51%	5.51%	5.75%	6.80%	6.72%
17	Subulussalam	19.92%	1.52%	1.31%	2.26%	3.15%	2.18%	2.16%
18	A. Selatan	2.60%	3.48%	4.41%	4.24%	4.37%	4.95%	4.89%
19	A. Singkil	2.31%	3.43%	4.03%	4.67%	3.85%	3.39%	3.35%
20	Simeulue	1.48%	2.38%	6.21%	6.44%	2.69%	3.43%	3.39%
21	Aceh Barat	5.27%	5.60%	5.48%	6.87%	6.34%	5.34%	5.28%
22	Nagan Raya	3.04%	4.60%	3.93%	4.37%	5.54%	5.11%	5.05%
23	Abdya	3.03%	4.04%	3.41%	4.93%	6.06%	6.45%	6.37%
	Rata-rata	4.69%	4.54%	4.75%	5.20%	5.30%	4.94%	4.88%

Sumber: Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh, data diolah,, 2015

Hasil pengolahan data memperlihatkan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD) masing-masing kabupaten kota di Provinsi Aceh relatif berbeda satu sama lain. Untuk lebih jelasnya mengenai perkembangan kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah (TPD) kabupaten kota di Provinsi Aceh selama periode tahun 2007-2013 dapat dilihat Tabel 3.

Mengacu pada Tabel 3 di atas dapat dilihat bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD) kabupaten kota di Provinsi Aceh relatif kecil. Secara rata-rata kontribusi PAD terhadap TPD kurang dari 10%.

### **Analisis Kontribusi PKB dan BBN-KB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Kontribusi PKB terhadap PAD masing-masing kabupaten kota di Provinsi Aceh relatif berbeda satu sama lain. Perbedaan tersebut tidak hanya disebabkan adanya perbedaan jumlah PKB yang diterima masing-masing kabupaten kota, tetapi juga disebabkan adanya perbedaan PAD. Untuk lebih jelasnya mengenai kontribusi PKB terhadap PAD masing-masing kabupaten kota di Provinsi Aceh dapat dilihat Tabel 4.

Berdasarkan Tabel 4 di atas dapat dilihat bahwa secara rata-rata kontribusi PKB terhadap PAD kabupaten kota di Provinsi Aceh berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2009 kontribusi PKB terhadap PAD menunjukkan angka sebesar 27,77%. Angka ini meningkat menjadi sebesar 28,23% pada tahun 2010 dan kemudian menurun menjadi sebesar 25,42% pada tahun 2011. Hingga tahun 2013 rata-rata kontribusi PKB terhadap PAD kabupaten kota di Provinsi Aceh menunjukkan angka sebesar 25,36%, lebih kecil bila dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 25,44%.

Kontribusi BBN-KB terhadap total PAD kabupaten kota di Provinsi Aceh juga relatif berbeda. Perbedaan tersebut tidak hanya terjadi di antara sesama kabupaten kota, tetapi juga terjadi pada kabupaten kota yang sama dalam periode waktu yang berbeda. Untuk lebih jelasnya mengenai perkembangan kontribusi BBN-KB terhadap PAD kabupaten kota di Provinsi Aceh selama periode tahun 2007-2013 dapat dilihat Tabel 5.

Berdasarkan Tabel 5 dapat dilihat bahwa secara rata-rata kontribusi BBN-KB terhadap PAD kabupaten kota di Provinsi Aceh berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2009 kontribusi BBN-KB terhadap PAD menunjukkan angka sebesar 23,90%. Angka ini meningkat menjadi sebesar 28,45% pada tahun 2010 dan kemudian menurun menjadi sebesar 26,21% pada tahun 2011. Hingga tahun 2013

rata-rata kontribusi PKB terhadap PAD kabupaten kota di Provinsi Aceh menunjukkan angka sebesar 26,81%, lebih kecil bila dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 27,76%.

**Tabel 4 Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kota di Provinsi Aceh Selama Periode Tahun 2007-2013**

No	Kabupaten /Kota	Tahun						
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Banda Aceh	23.81%	65.46%	66.61%	68.51%	71.48%	48.99%	48.84%
2	Sabang	18.00%	17.35%	13.59%	24.62%	10.92%	11.62%	11.59%
3	A. Besar	26.39%	79.63%	66.46%	53.76%	49.13%	59.26%	59.09%
4	Pidie	26.25%	65.49%	69.13%	46.99%	41.73%	52.85%	52.70%
5	Aceh Jaya	14.32%	9.53%	6.99%	11.91%	18.03%	17.87%	17.82%
6	Bireuen	55.10%	40.93%	31.83%	39.95%	26.23%	22.78%	22.71%
7	Pidie Jaya	52.00%	56.79%	38.93%	32.23%	16.81%	16.41%	16.37%
8	Bener Meriah	42.36%	6.99%	33.00%	21.19%	21.03%	22.56%	22.50%
9	Lhokseumawe	50.32%	44.17%	57.16%	59.17%	54.80%	53.08%	52.93%
10	Aceh Utara	7.49%	5.56%	8.84%	25.08%	18.36%	16.56%	16.51%
11	Aceh Timur	36.80%	11.34%	20.48%	11.96%	11.94%	19.95%	19.89%
12	Aceh Tengah	34.17%	30.75%	30.55%	29.63%	31.43%	32.13%	32.04%
13	Gayo Lues	6.45%	5.63%	6.24%	7.97%	7.38%	7.54%	7.51%
14	A. Tenggara	10.44%	12.25%	11.67%	19.37%	10.65%	13.83%	13.79%
15	Langsa	34.88%	26.58%	25.48%	30.54%	34.74%	36.52%	36.41%
16	A. Tamiang	19.28%	20.97%	20.30%	27.09%	25.23%	19.23%	19.17%
17	Subulussalam	0.76%	0.77%	4.50%	4.62%	5.11%	6.95%	6.93%
18	A. Selatan	24.84%	18.51%	17.74%	22.31%	20.81%	16.77%	16.72%
19	A.Singkil	21.94%	18.34%	17.05%	22.81%	22.99%	25.59%	25.51%
20	Simeulue	12.58%	7.81%	4.09%	4.93%	13.44%	10.11%	10.08%
21	Aceh Barat	32.79%	32.74%	33.09%	32.23%	32.06%	35.87%	35.76%
22	Nagan Raya	30.63%	22.97%	25.75%	30.71%	24.53%	24.92%	24.85%
23	Abdya	20.41%	15.10%	20.13%	21.62%	15.73%	13.66%	13.62%
	Rata-rata	<b>26.18%</b>	<b>26.77%</b>	<b>27.37%</b>	<b>28.23%</b>	<b>25.42%</b>	<b>25.44%</b>	<b>25.36%</b>

Sumber: Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh, data diolah, 2015

Adanya fluktuasi kontribusi BBN-KB terhadap PAD pada masing-masing kabupaten kota di Provinsi Aceh seperti dijelaskan di atas juga tidak terlepas dari kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk melakukan balik nama kendaraan yang mereka miliki. Masyarakat yang menyadari pentingnya balik nama kendaraan bermotor untuk menambah PAD daerah tempat mereka tinggal akan cenderung melakukan balik nama kendaraan bermotor yang mereka miliki.

**Tabel. 5 Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kota di Provinsi Aceh Selama Periode Tahun 2007-2013**

No	Kabupaten /Kota	Tahun						
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Banda Aceh	15.96%	11.16%	10.76%	17.54%	13.92%	11.16%	15.64%
2	Sabang	25.37%	24.45%	11.58%	21.45%	9.39%	9.97%	9.90%
3	A. Besar	19.07%	6.70%	28.03%	25.15%	20.20%	20.87%	8.16%
4	Pidie	30.94%	24.52%	20.88%	13.13%	13.44%	29.67%	19.96%
5	Aceh Jaya	31.64%	21.05%	15.27%	19.14%	34.45%	34.04%	33.81%
6	Bireuen	17.40%	52.28%	31.07%	36.76%	24.71%	21.39%	21.25%
7	Pidie Jaya	4.94%	5.40%	12.87%	37.26%	26.47%	25.77%	25.59%
8	Bener Meriah	27.79%	8.05%	22.09%	25.44%	22.61%	24.19%	24.03%
9	Lhokseumawe	28.75%	46.79%	31.97%	28.72%	36.97%	35.71%	35.47%
10	Aceh Utara	21.42%	15.90%	15.98%	46.48%	29.93%	26.91%	26.73%
11	Aceh Timur	23.29%	41.80%	37.31%	26.58%	26.00%	43.34%	43.05%
12	Aceh Tengah	31.15%	28.03%	26.83%	28.66%	35.23%	35.92%	35.68%
13	Gayo Lues	17.23%	15.03%	13.19%	15.44%	15.24%	15.53%	15.42%
14	A. Tenggara	19.01%	22.32%	25.27%	38.67%	24.50%	31.72%	31.51%
15	Langsa	52.36%	39.90%	31.02%	36.98%	34.23%	35.88%	35.64%
16	A. Tamiang	40.37%	43.89%	24.65%	44.64%	41.11%	31.24%	31.03%
17	Subulussalam	4.76%	4.82%	29.74%	31.16%	33.47%	45.37%	45.07%
18	A. Selatan	42.94%	32.00%	24.20%	29.16%	27.05%	21.73%	21.59%
19	A. Singkil	73.62%	61.56%	33.30%	23.53%	35.18%	39.04%	38.78%
20	Simeulue	34.66%	21.53%	6.81%	5.34%	8.28%	6.21%	6.17%
21	Aceh Barat	50.74%	50.65%	40.21%	36.77%	35.80%	39.94%	39.68%
22	Nagan Raya	9.83%	53.66%	35.34%	43.64%	37.82%	38.31%	38.06%
23	Abdya	32.01%	23.69%	21.22%	22.73%	16.87%	14.61%	14.51%
	<i>Rata-rata</i>	<i>28.49%</i>	<i>28.49%</i>	<i>23.90%</i>	<i>28.45%</i>	<i>26.21%</i>	<i>27.76%</i>	<i>26.81%</i>

Sumber: Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh, data diolah, 2015

### **Analisis Kontribusi PBB-KB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

**Tabel. 6 Kontribusi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kota di Provinsi Aceh Selama Periode Tahun 2007-2013**

No	Kabupaten /Kota	Tahun						
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Banda Aceh	5.77%	3.84%	3.85%	3.76%	3.56%	2.41%	2.38%
2	Sabang	5.63%	5.17%	3.75%	3.69%	3.04%	3.15%	3.11%
3	A. Besar	2.44%	2.08%	3.44%	2.65%	4.04%	3.47%	3.36%
4	Pidie	5.82%	4.39%	3.97%	2.53%	3.61%	2.56%	2.54%
5	Aceh Jaya	2.78%	6.10%	4.30%	4.83%	5.05%	5.43%	4.66%
6	Bireuen	2.78%	2.87%	3.91%	2.76%	4.10%	4.37%	4.59%
7	Pidie Jaya	5.56%	5.78%	2.79%	2.02%	5.51%	3.53%	2.63%
8	Bener Meriah	4.09%	3.47%	2.17%	4.95%	3.74%	4.03%	3.88%
9	Lhokseumawe	2.81%	2.35%	2.45%	2.44%	2.16%	2.07%	2.05%
10	Aceh Utara	2.23%	4.40%	5.30%	4.55%	3.38%	3.00%	2.97%
11	Aceh Timur	4.56%	4.52%	4.96%	2.67%	6.01%	3.89%	3.74%
12	Aceh Tengah	5.25%	4.50%	4.36%	3.53%	3.23%	3.26%	3.22%
13	Gayo Lues	4.16%	5.17%	3.79%	3.54%	2.74%	2.76%	2.67%
14	A. Tenggara	5.77%	6.45%	5.12%	4.75%	2.81%	3.59%	3.56%
15	Langsa	2.13%	6.15%	3.89%	3.86%	4.77%	4.03%	5.46%
16	A. Tamiang	3.06%	3.17%	2.96%	3.18%	2.53%	4.44%	4.30%
17	Subulussalam	6.14%	5.93%	4.00%	2.19%	5.13%	2.19%	2.17%
18	A. Selatan	5.27%	3.74%	3.01%	3.34%	2.70%	2.15%	2.14%
19	A. Singkil	4.34%	3.46%	2.62%	2.56%	2.65%	2.88%	2.85%
20	Simeulue	5.31%	3.14%	4.14%	4.14%	2.42%	1.79%	5.85%
21	Aceh Barat	2.06%	4.11%	3.86%	3.35%	2.63%	2.83%	3.05%
22	Nagan Raya	7.20%	5.14%	5.15%	5.11%	3.65%	3.65%	3.61%
23	Abdya	5.76%	4.06%	4.23%	4.07%	2.72%	2.32%	2.30%
	Rata-rata	4,39%	4,35%	3,83%	3,50%	3,57%	3,21%	3,35%

*Sumber: Sumber: Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh, data diolah,, 2015*

Hasil penelitian menunjukkan, PBB-KB memiliki kontribusi dalam pembentukan PAD masing-masing kabupaten kota di Provinsi Aceh. Sesuai dengan perbedaan nilai nominal PBB-KB dan PAD yang dimiliki oleh kabupaten kota, kontribusi PBB-KB dan PAD juga relatif berbeda. Berdasarkan

Tabel 6 dilihat bahwa secara rata-rata kontribusi PBB-KB terhadap PAD kabupaten kota di Provinsi Aceh berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2008 kontribusi PBB-KB terhadap PAD menunjukkan angka sebesar 4,35% lebih kecil bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 4,39%. Pada tahun 2009 kontribusi PBB-KB terhadap PAD sebesar 3,83%. Angka ini menurun menjadi sebesar 3,50% pada tahun 2010 dan kemudian meningkat menjadi sebesar 3,57% pada tahun 2011. Hingga tahun 2013 rata-rata kontribusi PBB-KB terhadap PAD kabupaten kota di Provinsi Aceh menunjukkan angka sebesar 3,35%, lebih besar bila dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 3,21%.

## **KESIMPULAN**

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten kota di Provinsi Aceh. Semakin tinggi penerimaan daerah yang bersumber dari PKB dan BBN-KB akan semakin tinggi pula PAD. Sebaliknya daerah dengan penerimaan yang bersumber dari PKB dan BBN-KB relatif rendah maka PAD daerah tersebut juga rendah. Di antara kedua variabel tersebut (PKB) dan BBN-KB, variabel yang pengaruhnya lebih dominan terhadap peningkatan PAD adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
2. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD) relatif rendah. Secara rata-rata kontribusi PAD terhadap TPD kabupaten kota di Provinsi Aceh sebesar 4,69% pada tahun 2007. Angka ini berfluktuasi dari tahun ke tahun hingga sebesar 4,88% pada tahun 2014.

## **SARAN**

1. Pemerintah kabupaten kota di Provinsi Aceh dipandang perlu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rendahnya kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD) mengindikasikan bahwa ketergantungan daerah terhadap dana yang berasal dari luar daerah relatif tinggi. Sehingga daerah kabupaten kota dinilai kurang mandiri bila dikaitkan dengan kemampuannya dalam membiayai kebutuhan pemerintahan di daerah.
2. Upaya peningkatan PAD pada kabupaten kota di Provinsi Aceh dapat dilakukan dengan menggali sumber-sumber penerimaan daerah yang baru selain dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB).

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Azhari, A. Samudra. 1995. **Perpajakan di Indonesia, Keuangan Pajak dan Retribusi Daerah**, Gramedia, Jakarta.
- Basri, Yuswar Zainul dan Mulyadi Subri. 2003. **Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Daud. 2004. Efisiensi dan Efektivitas Pajak Hotel dan Restoran Dalam Peningkatan PAD di Kabupaten Kendari, **Jurnal Manajemen Keuangan Daerah**.
- Devas, Nick. 1995. **Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia**, UI Press, Jakarta.
- Gomies, S dan Victor P. 2011. Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Maluku Tenggara, **Aset**, September 2011, hal. 175-183 Vol. 13 No. 2.
- Gujarati, Damodar, 2006. **Ekonometrika Dasar**. Alih Bahasa: Sumarno Zain, Erlangga: Jakarta.
- Halim, Abdul. 2004. **Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah**, Edisi Revisi, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Halim, Abdul. 2007. **Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah**, Salemba Empat, Jakarta.
- Ikhsan., M, Santosa dan Harmanti. 2007. **Administrasi Keuangan Publik**, Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta.
- Ismail, Munawar. 2001. **Pendapatan Asli Daerah dalam Otonomi Daerah**, Telaah Ekonomi Volume II.
- Kaho, Josef Riwu. 2001. **Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia**, PT.Grafindo Persada, Jakarta.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2002 **Tentang Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah Bagian Tim Pembina Pusat**
- Mahmudi. 2007. **Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Mangkoesebroto, Guritno. 1999. **Ekonomi Publik**, BPFE UGM, Yogyakarta.